



KABUPATEN BUTON TENGAH
DESA KAMAMA MEKAR



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BUTON TENGAH



Profil Desa Desa Kamama Mekar

2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Profil Desa Kamama Mekar 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Profil desa ini merupakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi umum, potensi, dan perkembangan desa yang disajikan sebagai bahan informasi sekaligus referensi bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Penyusunan profil desa ini bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan relevan guna mendukung proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta pemantauan kemajuan desa. Informasi yang dimuat meliputi identitas desa, letak geografis, kondisi demografi, potensi sumber daya alam, potensi ekonomi, infrastruktur, hingga kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Proses pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan profil ini melibatkan kerja sama yang erat antara pemerintah desa, Badan Pusat Statistik, tokoh masyarakat, serta warga desa. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pihak telah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan profil desa yang komprehensif dan bermanfaat.

Kami menyadari bahwa profil desa ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan maupun kedalaman data. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada penyusunan profil desa di masa mendatang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan Profil Desa Kamama Mekar 2026 ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi salah satu acuan penting dalam mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, semoga profil desa ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat desa, serta dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata.

Desa Kamama Mekar, Agustus 2026

Kepala Desa Kamama Mekar

The image shows a circular official stamp of the village of Kamama Mekar, Kecamatan Gunung, Kabupaten Buton Tenggara. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Ismail'.

Ismail, S.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. Perkembangan Kependudukan	1
A. Jumlah Penduduk.....	1
B. Jumlah Keluarga	1
II. Ekonomi Masyarakat	1
A. Pengangguran	1
B. Keluarga Penerima Bantuan.....	1
III. Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat.....	2
A. Aset Sarana Transportasi Umum.....	2
B. Aset Sarana Produksi	2
C. Aset Perumahan	2
IV. Pendidikan Masyarakat	4
A. Wajib Belajar 9 Tahun	4
V. Kesehatan Masyarakat	4
A. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	4
B. Wabah Penyakit	4
C. Angka Harapan Hidup.....	6
D. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih.....	7
E. Status Gizi Balita	8
F. Jumlah Penderita Sakit Tahun ini.....	8
G. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat.....	8
VI. Keamanan dan Ketertiban	8
A. Konflik SARA.....	8
B. Masalah Kesejahteraan Sosial	10
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	10
D. Teror dan Intimidasi	17
VII. Kedaulatan Politik Masyarakat.....	11
A. Kesadaran Berpemerintahan, Berbangsa, dan Bernegara	11
B. Kesadaran Membayar Pajak dan Retribusi.....	12
C. Partisipasi Politik.....	13
D. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	15

GAMBARAN UMUM PROGRAM DESA CINTA STATISTIK (DESA CANTIK) 2026

Desa Cinta Statistik, atau yang akrab disebut program Desa Cantik, merupakan terobosan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengoptimalkan sistem tata kelola data di lingkup pemerintahan desa. Pada tahun 2026, program ini diintensifkan melalui pendampingan langsung bagi desa-desa sasaran. Tujuannya adalah memastikan setiap desa mampu memproduksi data yang presisi, terkini, terintegrasi, akuntabel, serta mudah dibagipakaikan. Inisiatif ini menjadi fondasi krusial dalam membangun ekosistem desa sadar data guna mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Pada pelaksanaannya di tahun 2026, titik berat program berada pada peningkatan kompetensi perangkat desa. Aparatur desa dibekali keahlian untuk mengumpulkan, mengelola, hingga menyajikan data melalui bimbingan teknis, asistensi teknologi digital, serta penyusunan profil desa berbasis statistik sektoral. Ruang lingkup data yang direkam sangat komprehensif dan mencerminkan kondisi riil di lapangan, mencakup Demografi (Kependudukan), Kondisi Sosial dan Ekonomi, Sarana Prasarana (Infrastruktur) dan Potensi Sumber Daya Lokal

Dengan mengusung pendekatan partisipatif yang melibatkan warga setempat, kualitas data yang dihasilkan tidak hanya dijamin lebih valid, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan Visi Satu Data Indonesia dari Akar Rumput

Harapan besar dari inisiatif ini adalah mempunyai aparatur desa dalam merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan, dan mengevaluasi program pembangunan dengan berpijak pada data statistik. Program Desa Cantik hadir lebih dari sekadar wadah edukasi literasi statistik; ini merupakan wujud nyata sinergi kolaboratif antara BPS, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk menyukseskan visi Satu Data Indonesia mulai dari tingkat paling dasar. Tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk mengukuhkan posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang digerakkan oleh data.



BAB I PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah Jiwa	Laki-laki	Perempuan
1	Kamama	131	58	73
2	Larumenda	257	128	129
3	Napaladai	168	82	86
Jumlah		556	268	288

B. Jumlah Keluarga

No	Dusun	Jumlah Keluarga	Persentase
1	Kamama	34	25%
2	Larumenda	59	44%
3	Napaladai	42	31%
Jumlah		135	100%

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1. Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)	372 orang
2. Jumlah penduduk angkatan kerja	158 orang
3. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang mengurus rumah tangga	96 orang
4. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang sekolah	48 orang
5. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebagai pensiunan	6 orang

B. Keluarga Penerima Bantuan

1	Jumlah keluarga penerima PKH	26 keluarga
2	Jumlah keluarga penerima BPNT	52 keluarga

III. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

A. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM	
Memiliki ojek	1 orang-1 unit
Memiliki becak	0 orang-0 unit
Memiliki cidemo/andong/dokar	0 orang-0 unit
Memiliki kapal motor	0 orang-0 unit
Memiliki bus	0 orang-0 unit
Memiliki mini bus	2 orang-2 unit
Memiliki helikopter dan atau pesawat	0 orang-0 unit
B. ASET SARANA PRODUKSI	
Memiliki penggilingan padi	0 orang
Memiliki traktor	0 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	0 orang
Memiliki kapal penangkap ikan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil Industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	0 orang
C. ASET PERUMAHAN	
RUMAH MENURUT DINDING	
Tembok	110 Rumah

Kayu	20 Rumah
Bambu	4 Rumah
Tanah liat	0 Rumah
Pelepah kelapa/lontar/gebang	0 Rumah
Dedaunan	0 Rumah
RUMAH MENURUT LANTAI	
Marmer/Granit	3 Rumah
Keramik	71 Rumah
Semen	39 Rumah
Papan/Kayu	19 Rumah
Bambu	3 Rumah
RUMAH MENURUT ATAP	
Genteng	1 Rumah
Seng	131 Rumah
Asbes	0 Rumah
Beton	2 Rumah
Bambu	0 Rumah
Kayu	0 Rumah
Daun lontar/gebang/enau	0 Rumah

IV. PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Wajib belajar 9 tahun

1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	130 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	124 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah/putus sekolah	6 orang

V. KESEHATAN MASYARAKAT

A. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB

Pasangan Usia Subur	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	52 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	161 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	1 orang
Jumlah pasangan usia subur	89 pasangan

B. Wabah Penyakit

MUNTABER	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
DEMAM BERDARAH	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	3 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
KOLERA	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
POLIO	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian

Jumlah yang meninggal	0 kejadian
CIKUNGUNYA	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
FLU BURUNG	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
BUSUNG LAPAR	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
KELAPARAN	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian

C. Angka Harapan Hidup Tahun 2025

Angka Harapan hidup penduduk Kabupaten Buton Tengah	70,65 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara	72,06 Tahun
Angka Harapan Hidup Nasional	74,21 Tahun

D. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih

1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	52 keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	223 keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan sumur bor	411 keluarga
Total jumlah keluarga	686 keluarga

E. Status Gizi Balita

Jumlah Balita	53 orang
Jumlah Balita bergizi buruk	0 orang
Jumlah Balita bergizi baik	0 orang
Jumlah Balita bergizi kurang	0 orang
Jumlah Balita bergizi lebih	0 orang

F. Jumlah Penderita Sakit tahun ini

Jumlah penyakit	Jumlah penderita	Di rawat di
Jantung	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
Lever	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
Paru-paru	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
Kanker	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
Stroke	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
Diabetes Melitus	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
Ginjal	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
Malaria	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
Lepra/Kusta	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
HIV/AIDS	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
Gila/stress	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
TBC	0 orang	Rumah dan RS
ISPA	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas
Asma	0 orang	Rumah/RS/Puskesmas

G. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat

Jumlah MCK Umum	1 unit
Jumlah Posyandu	1 unit
Jumlah kader Posyandu aktif	8 orang
Jumlah pembina Posyandu	1 orang
Jumlah Dasawisma	19 Dasawisma
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	19 orang
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi
Jumlah kader kesehatan lainnya	0 orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	0 jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	0 jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	1 jenis

VI. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

A. Konflik SARA

Jumlah konflik SARA pada tahun ini (perkelahian/pertengkaran)	0 kasus
Jumlah kerugian	Rp.0
Jumlah kasus pencurian pada tahun ini	0 kasus
Jumlah pelaku diadili atau diproses secara hukum	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 kasus
Jumlah kasus perjudian, penipuan, dan penggelapan	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dan penculikan	0 orang
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 kasus

B. Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah gelandangan	0 kasus
Jumlah pengemis jalanan	0 kasus
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 kasus
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 kasus
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	0 kasus
Jumlah orang cacat fisik	0 kasus
Jumlah orang kelainan kulit	0 kasus
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 kasus
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 kasus
Jumlah panti jompo	0 kasus
Jumlah panti asuhan anak	0 kasus
Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 kasus
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 kasus
Jumlah penghuni bantaran sungai	0 kasus
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 kasus
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 kasus
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 kasus
Jumlah janda	19 kasus
Jumlah duda	5 kasus
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	0 kasus
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	0 kasus
Jumlah penduduk eks NAPI	3 kasus
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	0 kasus
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 kasus
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	0 kasus
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana	0 kasus

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	1 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 kasus

D. Teror dan Intimidasi

Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	0 kasus

VII. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara

Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	0 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus

Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	0 kasus

B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi

Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	0 jenis
Target PBB	Rp.6.000.000,00
Realisasi PBB	100%
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	0 tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	0 jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp. 0
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	0 jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp. 0
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0 %
Jumlah kasus pungutan liar	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	0 kasus

C. Partisipasi Politik

1. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan

Penentuan Jabatan Kepala Desa	Dipilih Masyarakat secara langsung
Penentuan Sekretaris Desa	Pansel (Panitia Seleksi), diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	Pansel (Panitia Seleksi), diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat
Masa jabatan Kepala Desa	8 (Delapan) tahun

2. Pemilihan BPD

Jumlah anggota BPD	7 (Tujuh) orang
Penentuan anggota BPD	1. Dipilih masyarakat secara langsung
Pimpinan BPD	1. Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Ada
Anggaran untuk BPD	Ada
Produk keputusan BPD tahun ini	1. Peraturan Desa
	2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali
	3. Rancangan Peraturan Desa 2 buah
	4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 4 kali
	5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 4 kali
	6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 2 kali
	7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 4 kali

3. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	1. Perdes
	2. Keputusan Kepala Desa
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	10 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/LKK
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	20 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	20 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Ada
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Ada
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	tidak
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	kurang memadai
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	80 %

Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	1. Ada dan terisi
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	Berfungsi

D. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	15 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	70 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	50 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	20 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	50 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan forum Musrenbang Partisipatif	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	100 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	100 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan	30 %

disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	0 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah kabupaten/Kota dan provinsi	2 kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	0 kegiatan

2. Peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	20 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	20 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	10 kegiatan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	0 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	30 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	50 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	50 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	20 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	Ada
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 Kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	1 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	15 kegiatan

Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	Ada kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	1 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	0 kegiatan

3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk

Jumlah kelompok arisan	0 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	0 orang
Ada tidaknya dana sehat	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Ada
Ada tidaknya kerjasama antar Desa/Kelurahan	Ada
Ada tidaknya penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong dalam penyelesaian konflik di setiap desa/kelurahan oleh masyarakat sendiri	Ada
Ada tidaknya gotong royong dalam menolong keluarga tidak mampu dan fakir miskin di desa dan kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa	Ada
Kegiatan gotong royong dalam penanggulangan bencana	Ada
Kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong	Ada

4. Adat Istiadat

Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif / ada
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif/ada
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Pernah ada
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Tidak
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Pernah Ada
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Tidak
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Aktif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BUTON TENGAH
BPS-STATISTICS BUTON TENGAH REGENCY**
Jl. Poros Waara-Lakapera, Kecamatan Gu, Buton Tengah
E-mail: bps7414@bps.go.id, Website: <https://butengkab.bps.go.id/>